

No Daftar FPIPS: 890/UN40.A2.2/PP/2019

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BPHN TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM
DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM MELALUI PROGRAM
DESA SADAR HUKUM**

**(Studi Deskriptif Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten
Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Kewarganegaraan



Oleh

Puspa Yuliasari

NIM 1504402

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

BANDUNG

2019

**Implementasi Peraturan Kepala BPHN tentang Pembentukan dan
Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
melalui Program Desa Sadar Hukum (Studi Deskriptif Desa Trusmi Wetan
Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)**

Oleh
Puspa Yuliasari

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

© Puspa Yuliasari 2019
Universitas Pendidikan Indonesia
April 2019

Hak Cipta dilindungi undang-undang.
Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian,
dengan dicetak ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa izin dari penulis.


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PUSPA YULIASARI

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BPHN TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR
HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM MELALUI
PROGRAM DESA SADAR HUKUM
(Studi Deskriptif Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten
Cirebon)**

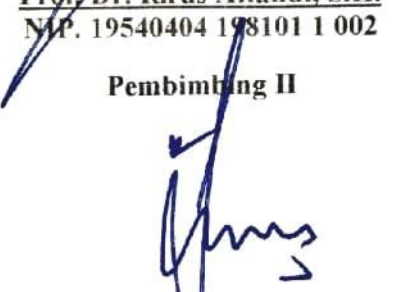
DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH

Pembimbing I




Prof. Dr. Idrus Affandi, S.H.
NIP. 19540404 198101 1 002

Pembimbing II



Dwi Iman Muthaqqin, SH.,MH.
NIP. 19861206 201504 1 001

**Mengetahui,
Ketua Departemen Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Universitas Pendidikan Indonesia**



Prof. Dr. H. Sapriya, M.Ed.
NIP. 19630820 198603 1 001

Skripsi Ini Diuji Pada

Hari/Tanggal

: Kamis, 25 April 2019

Tempat

: Gedung FPIPS UPI

PanitiaUjian Terdiri Dari:

1. Ketua:



Dr. Agus Mulyana, M.Hum.
NIP. 19660808 199103 1 002

2. Sekretaris:




Prof. Dr. H. Sanriya, M.Ed.
NIP. 19630820 198803 1 001

3. Penguji:



Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.
NIP.19620316 198803 1 003



Dr. Susan Fitriyasari, M.Pd.
NIP. 19820730 200912 2 004



Dr. Leni Anggraeni, M.Pd.
NIP. 19840222 200912 2 214

Puspa Yuliasari, 2019

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BPHN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM MELALUI PROGRAM DESA
SADAR HUKUM (Studi Deskriptif Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ABSTRAK

Puspa Yuliasari. (1504402). IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BPHN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM MELALUI PROGRAM DESA SADAR HUKUM (STUDI DESKRIPTIF DESA TRUSMI WETAN KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON)

Program desa sadar hukum merupakan suatu kebijakan yang menarik untuk dikaji, karena program tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai pendukung penyelenggaraan negara hukum di Indonesia. Untuk menjadi desa sadar hukum, suatu desa harus memenuhi kriteria dan melewati beberapa proses pembentukan yang diatur dalam Peraturan Kepala BPHN Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Penelitian ini mendeskripsikan secara mendalam mengenai pengimplementasian program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, hambatan, dan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan program desa sadar hukum dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dengan membuat perencanaan yang sistematis dari segi penyusunan rancangan kegiatan/penjadwalan, strategi pelaksanaan, perincian prosedur operasional program, hingga menentukan sistem evaluasi program. (2) Pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan dilakukan mulai dari pengusulan, pembinaan, penilaian, penetapan, dan peresmian. (3) Hambatan dalam pengimplementasian program di antaranya keterbatasan dana dan fasilitas pengelolaan sampah, masalah pengumpulan data, serta masalah terkait komunikasi. (4) Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu penggunaan dana mandiri dalam operasionalisasi program, pembuatan grup di media sosial, pengadaan bimbingan teknis bagi aparat desa, pembuatan oven sampah. Upaya lain yang ditawarkan peneliti yaitu melakukan pengecekan data dan observasi mendalam ke berbagai elemen masyarakat untuk mengatasi ketidaksesuaian data dan fakta, pengadaan bank sampah di Desa Trusmi Wetan, serta upaya meningkatkan kesadaran hukum melalui pendidikan sejak dini.

Kata Kunci: Desa Sadar Hukum, Kesadaran Hukum Masyarakat.

ABSTRACT

Puspa Yuliasari. (1504402). IMPLEMENTATION OF NLGI HEAD REGULATION ON ESTABLISHING AND GUIDING LEGAL CONSCIOUS FAMILY AND LEGAL CONSCIOUS VILLAGE THROUGH LEGAL CONSCIOUS VILLAGE PROGRAM (DESCRIPTIVE STUDY AT TRUSMI WETAN VILLAGE, PLERED DISTRICT, CIREBON)

Legal conscious village program is an interesting policy to study, because this program aims to increase public legal awareness as a supporter of the implementation of a legal state in Indonesia. To become a legal conscious village, a village must approve and go through several processes regulated in the Regulation of the Head of BPHN Number: PHN.HN.03.05-73 of 2008 concerning the Establishment and Development of Legal Conscious Family and Legal Conscious Village. This study discusses the implementation of legal conscious village program in Trusmi Wetan Village, discusses planning, implementation, obstacles, and efforts to overcome obstacles in implementing legal conscious village program in Trusmi Wetan Village, using qualitative approach and descriptive method. The results of the study show that: (1) Legal conscious village planning program is carried out by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in West Java by making systematic planning in terms of preparation, scheduling, implementation strategies, detailed operational procedure programs, improvement system management programs. (2) Implementation of the program in Trusmi Wetan Village starting from the proposal, guidance, assessment, determination and inauguration. (3) Obstacles in implementation program are lend funds and waste management facilities, data collection problems, and communication. (4) Related to the efforts that have been made are using independent funds in the operationalization of programs, making groups on social media, providing technical guidance for village officials, making garbage ovens. Other efforts offered by researcher were checking data and observations of various elements of the community to overcome data and fact mismatches, procuring waste banks in Trusmi Wetan Village, as well as efforts to increase legal awareness through early education.

Keywords: Legal Conscious Village, Legal Awareness.

Puspa Yuliasari, 2019

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BPHN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM MELALUI PROGRAM DESA SADAR HUKUM (Studi Deskriptif Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	i
KATA PENGANTAR.....	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.3.1 Tujuan Umum	11
1.3.2 Tujuan Khusus	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Segi Teoretis	11
1.4.2 Secara Praktis.....	12
1.4.3 Segi Kebijakan	12
1.4.4 Segi Isu serta Aksi Sosial.....	12
1.5 Struktur Organisasi Skripsi.....	12
BAB II KAJIAN TEORI.....	14
2.1 Hakikat Kebijakan Publik.....	14
2.1.1 Definisi Kebijakan Publik.....	14
2.1.2 Bentuk-bentuk Kebijakan Publik.....	18
2.1.3 Aspek-aspek yang Memengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik.....	21
2.1.4 Analisis Kebijakan Publik.....	23
2.1.5 Proses Perumusan Kebijakan Publik	24
2.1.6 Implementasi Kebijakan Publik.....	31
2.1.7 Pendekatan Kebijakan Publik	36
2.1.8 Kebijakan Publik sebagai Kajian Pendidikan Kewarganegaraan	38
2.2 Analisis mengenai Peraturan BPHN	40
2.2.1 Kedudukan Peraturan BPHN	40
2.3 Kajian tentang Kesadaran Hukum Masyarakat	41
2.3.1 Definisi Kesadaran Hukum	41
2.3.2 Indikator Kesadaran Hukum	44
2.3.3 Tingkatan Kesadaran Hukum.....	45
2.3.4 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kesadaran Hukum	46
2.4 Kajian tentang Program Desa Sadar Hukum.....	49
2.4.1 Definisi Program Desa Sadar Hukum.....	49

Puspa Yuliasari, 2019

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BPHN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM MELALUI PROGRAM DESA SADAR HUKUM (Studi Deskriptif Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2.4.2	Definisi Desa Sadar Hukum.....	49
2.4.3	Kriteria Desa Sadar Hukum	50
2.5	Penelitian Terdahulu yang Relevan	52
2.5.1	Subjek Penelitian	52
2.5.2	Temuan Penelitian	52
2.5.3	Posisi Teoretis Peneliti.....	53

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 54

3.1	Desain Penelitian	54
3.1.1	Pendekatan Penelitian	54
3.1.2	Metode Penelitian	55
3.2	Lokasi dan Subjek Penelitian	56
3.2.1	Lokasi Penelitian.....	56
3.2.2	Subjek Penelitian	57
3.3	Teknik Pengumpulan Data	58
3.3.1	Wawancara.....	58
3.3.2	Observasi.....	59
3.3.3	Studi Dokumentasi.....	59
3.4	Instrumen Penelitian.....	60
3.5	Prosedur Penelitian.....	61
3.5.1	Tahap Pra Penelitian	61
3.5.2	Tahap Pelaksanaan.....	62
3.5.3	Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data	63
3.6	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	64
3.6.1	Pengumpulan Data (<i>Data Collection</i>).....	65
3.6.2	Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>).....	65
3.6.3	Sajian Data (<i>Data Display</i>).....	66
3.6.4	Penarikan Kesimpulan (<i>Conclusion Drawing/ Verification</i>).....	66
3.7	Uji Validitas Data.....	67
3.7.1	Trianggulasi	67

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 68

4.1	Deskripsi Umum Lokasi dan Partisipan Penelitian	68
4.1.1	Letak Geografis Desa Trusmi Wetan.....	68
4.1.2	Keadaan Demografis Penduduk di Desa Trusmi Wetan.....	70
4.1.3	Profil Desa Trusmi Wetan.....	71
4.2	Deskripsi Temuan Penelitian.....	74
4.2.1	Perencanaan Pembentukan Desa Sadar Hukum di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.....	77
4.2.2	Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon	84
4.2.3	Hambatan dalam Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon	90

Puspa Yuliasari, 2019

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BPHN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM MELALUI PROGRAM DESA SADAR HUKUM (Studi Deskriptif Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4.2.4	Upaya Menanggulangi Hambatan dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sadar Hukum di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon	92
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	95
4.3.1	Perencanaan Pembentukan Desa Sadar Hukum di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.....	96
4.3.2	Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon	104
4.3.3	Hambatan dalam Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon	116
4.3.4	Upaya Menanggulangi Hambatan dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sadar Hukum di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon	120
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI		128
5.1	Simpulan.....	128
5.1.1	Simpulan Umum	128
5.1.2	Simpulan Khusus	129
5.2	Implikasi	131
5.3	Rekomendasi	132
5.3.1	Bagi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat	132
5.3.2	Bagi Bagian Hukum Kabupaten Cirebon.....	133
5.3.3	Bagi Aparat Desa Trusmi Wetan	133
5.3.4	Bagi Masyarakat Desa Trusmi Wetan	134
5.3.5	Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan.....	134
5.3.6	Bagi Peneliti Selanjutnya	135

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Analisis Kebijakan.....	24
Gambar 2.2 Tahapan Proses Pembuatan Kebijakan Publik.....	26
Gambar 2.3 Proses Implementasi Kebijakan Publik.....	35
Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif.....	64
Gambar 4.1 Peta Desa Trusmi Wetan.....	69
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Trusmi Wetan.....	74
Gambar 4.3 Proses Perencanaan Program Desa Sadar Hukum.....	97
Gambar 4.4 Siklus Pendekatan Andragogi.....	123

Puspa Yuliasari, 2019

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BPHN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM MELALUI PROGRAM DESA
SADAR HUKUM (Studi Deskriptif Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Gangguan Kamtibmas Kecamatan Plered.....	2
Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi Kebijakan.....	28
Tabel 2.2 Proses Perumusan Kebijakan Publik	29
Tabel 3.1 Partisipan Penelitian.....	57
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Trusmi Wetan	70
Tabel 4.2 Sistem Mata Pencaharian Masyarakat Desa Trusmi Wetan	71
Tabel 4.3 Subjek Penelitian	75
Tabel 4.4 Trianggulasi dengan Tiga Sumber/Informan	81
Tabel 4.5 Trianggulasi dengan Tiga Sumber/Informan	90
Tabel 4.6 Trianggulasi dengan Tiga Sumber/Informan	93
Tabel 4.7 Prosentase Kelunasan PBB Desa Trusmi Wetan Tahun 2016.....	106
Tabel 4.8 Angka Perkawinan di bawah Umur Desa Trusmi Wetan 2017	107
Tabel 4.9 Angka Kriminalitas dan Kasus Narkoba Desa Trusmi Wetan Tahun 2017.....	108
Tabel 4.10 Data Masalah Kebersihan di Desa Trusmi Wetan 2017	109
Tabel 4.11 Data Siswa Sekolah Dasar Desa Trusmi Wetan Tahun yang Putus Sekolah	109
Tabel 4.12 Hasil Evaluasi Program Desa Sadar Hukum di Desa Trusmi Wetan Tahun 2017	113

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Lembar Pengesahan BAB Skripsi
- Lampiran 3 Surat Izin dan Keterangan Penelitian
- Lampiran 4 Catatan Kemajuan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Daftar *Checklist* Pustaka
- Lampiran 6 Matriks Hasil Penelitian
- Lampiran 7 Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran 8 Pedoman Obervasi
- Lampiran 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
- Lampiran 10 Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
- Lampiran 11 Dokumentasi Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ali, F, dan Alam, A.S. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT Refika Aditama
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. (2018). *Buku Panduan untuk Kelompok/Keluarga Sadar Hukum*. Cirebon: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press
- Bungin, B. (2010). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP
- Danial, E, dan Warsiah, N. (2009). *Metoda Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium PKn FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia.
- Dunn, W.N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Fermana, S. (2009). *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Herdiansyah, H. (2013). *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Heryani, A. (2010). *Paradigma Kebijakan Publik*. Bandung: UNPAD PRESS
- Islamy, I. (2014). *Definisi dan Makna Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Kansil, C.S.T. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. (2017). *Buku Panduan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2017*. Bandung: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
- Kusumohamidjojo, B. (1999). *Ketertiban yang Adil: Problematik Filsafat Hukum*. Jakarta: Grasindo
- Madani, M. (2011). *Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Puspa Yuliasari, 2019

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BPHN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM MELALUI PROGRAM DESA SADAR HUKUM (Studi Deskriptif Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing
- Sanusi, A. (1984). *Masalah Kesadaran Hukum dalam Masyarakat Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Bina Cipta
- Saptomo, A. (2014). *Budaya Hukum & Kearifan Lokal: Sebuah Perspektif Perbandingan*. Jakarta: FHUP Press
- Satori, D, dan Komariah, A. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali
- Soekanto, S. (2003). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soeprapto, M.F.I. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sudjana, D. (2007) *Sistem & Manajemen Pelatihan: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Fallah Production
- Suharto, E. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Widjaja, A.W. (1985). *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: CV Era Swasta
- Wahab, S.A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Sumber Jurnal

- Ade, V, dan Affandi, I. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Mengembangkan Keterampilan Kewarganegaraan (Studi Deskriptif Analitik Pada Masyarakat Talang Mamak Kec. Rakit Kulim, Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau). *JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25 (1), 77-91.

Puspa Yuliasari, 2019

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BPHN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM MELALUI PROGRAM DESA SADAR HUKUM (Studi Deskriptif Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Ariani, N.V. (2017). Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum DE 2JURE*, 17 (1), 29-47.
- Budimansyah, D, dkk. (2018). AIDA Model PC Extension (Attention, Interest, Desire, Action, Based Projectcitizen) to Address the Practice of Bullying among Students in the Regency of Pangandaran. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 299, 527-534.
- Kuncorowati, P.W. (2009). Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Civics*, 6 (1), 26-53.
- Mariana, D. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1 (2), 216-229
- Muthaqqin, D.I. (2016). Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Kegiatan Perbankan Tanpa Izin sebagai Bentuk Kejahatan Korporasi. *Jurnal Civicus*, 20 (2), 12-22.
- Ramdhani, A, dan Ramdhani, M.A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1 (11), 1-12.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIS* 10 (1), 1-25.
- Rubiyannor, M, dkk. (2016). Kajian Bank Sampah sebagai Alternatif Pengelolaan Sampah Domestik di Kota Banjarbaru. *Jukung Jurnal Teknik Lingkungan*, 2 (1), 39-50.
- Suryani, A.S. (2014). Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah: Studi Kasus Bank Sampah Malang. *Aspirasi*, 5 (1), 71-84.
- Usman, A.H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30 (1), 26-53.
- Sutisna, A. (2015). Pengembangan Model Bimbingan Teknis Berkelanjutan dalam Meningkatkan Kompetensi Tutor Paket C. *Jurnal Ilmiah VISI PPTK PAUDNI*, 10 (2), 93-101.

Sumber Skripsi, Thesis, dan Disertasi

- Damayanti, A. (2015). *Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung*. (Skripsi). Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Sapriya. (2007). *Perspektif Pemikiran tentang PKn dalam Pembangunan Karakter Bangsa*. (Disertasi). Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Puspa Yuliasari, 2019

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BPHN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM MELALUI PROGRAM DESA SADAR HUKUM (Studi Deskriptif Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tahalua, M.I. (2015). *Perencanaan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kota Ambon*. (Tesis). Sekolah Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Wulandari, T.N. (2017). *Kajian terhadap Efektifitas Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat (Studi Kota Pontianak)*. (Tesis). Sekolah Pascasarjana, Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Sumber Lainnya

Mutahir, A.H. (2017). *Pemikiran Jean-Jacques Rousseau tentang Kehendak Umum dan Usaha Mencari Negara Ideal*. Tersedia [Online]: <https://grahafilisafat.files.wordpress.com/2017/03/pemikiran-rousseau.pdf>(28 September 2018)

Puspa Yuliasari, 2019

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BPHN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM MELALUI PROGRAM DESA SADAR HUKUM (Studi Deskriptif Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu